

BAB III

KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SRAGEN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN

PERTANIAN KOMODITAS PADI TAHUN 2016

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam bidang pembangunan pertanian komoditas padi merupakan hasil kerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen selama tahun 2016. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam periode tersebut adalah upaya-upaya dalam pengembangan dan pembangunan pertanian pada komoditas padi di Kabupaten Sragen guna merealisasikan target-target yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen.

Dinas Pertanian Kabupaten Sragen mempunyai peran lebih terhadap pengelolaan pada bidang produksi pertanian, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen berperan lebih pada bidang pendampingan para petani baik sebelum penanaman hingga pasca panen. Kinerja dari kedua dinas tersebut akan berpengaruh pada tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen, dalam hal ini adalah komoditas padi, serta secara langsung maupun tidak langsung juga mempunyai efek terhadap tingkat kesejahteraan para petani padi di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pegawai Dinas Pertanian bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut:

“Berdasarkan peranannya, Dinas Pertanian memegang pengelolaan produksi. Untuk pendampingan petani dari sebelum hingga sesudah panen itu tugasnya Dinas Ketahanan Pangan. Dua-duanya untuk mensejahterakan petani melalui peningkatan hasil produksi padi”. (Sugeng, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

A. Ringkasan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

Kabupaten Sragen memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal menjadi tantangan dalam pertanian di Kabupaten Sragen. Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sragen tahun 2016-2021 mempunyai program antara lain, pertama, peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. Dinas Pertanian dalam usaha meningkatkan produktivitas padi pada tahun 2016 menetapkan target sebesar 64,62 ku/ha. Kedua, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Pelaksanaan bimbingan teknologi pertanian kepada para petani bertujuan untuk modernisasi metode dalam bertani. Penggunaan teknologi berupa alat dan mesin pertanian dianggap dapat mempermudah petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Ketiga, peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatkan produktivitas pertanian akan berdampak linier dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Sedangkan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen tahun 2016-

2021 mempunyai program antara lain, pertama, program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Ketiga, Program peningkatan ketahanan pangan. Keempat, program peningkatan kesejahteraan petani. Kelima, program penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Keenam, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Ketujuh, program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

Hasil dari pelaksanaan kerja sangat perlu diketahui baik dari pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat secara umum. Dengan melihat hasil kinerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, masyarakat khususnya para petani padi, dapat memperoleh informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh dinas, serta apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan para petani padi.

B. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam Bidang Pembangunan Komoditas Padi Tahun 2016

Adapun dalam penilaiannya, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat diukur dengan menggunakan indikator Produktivitas, Responsibilitas, Responsivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas. Indikator-indikator tersebut biasa digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari suatu instansi pemerintahan sehingga dengan menilik hasil kerja yang telah dilaksanakan dapat melakukan evaluasi atau perbaikan dan membuat kebijakan-kebijakan agar terlaksananya kegiatan

kedepan yang lebih baik. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen.

1. Produktivitas

a. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Hasil Produksi Padi

Produktivitas dalam suatu instansi pemerintahan dapat dinilai dengan membandingkan antara input dengan output. Dalam menilai produktivitas Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani melalui hasil produksi padi dapat dilakukan dengan membandingkan antara angka produktivitas panen yang telah direncanakan dengan angka produktivitas panen yang telah dilakukan atau yang sudah terlaksana.

Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani padi melalui hasil produksi padi berpegang pada rencana pembangunan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Adapun target dalam peningkatan produktivitas pertanian pada tanaman padi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Rencana Strategis Produktivitas Tanaman Padi

Indikator	Satuan	Kondisi 2015	Target			Akhir RPJMD 2021
			2016	2017	2018	
Padi	ku/ha	64,52	64,62	64,72	64,82	65,12

Sumber: RPJMD Kab. Sragen 2016-2021

Target produktivitas tanaman padi di kabupaten Sragen dari tahun 2016 hingga 2021 terus meningkat, meskipun sering dihadapkan pada problematika lahan pertanian yang terus berkurang. Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah produktivitas komoditi padi pada tahun 2015 sebesar 64,52 kw/ha dan ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai 65,12 kw/ha atau meningkat sebesar 0.6 kw/ha. Hal tersebut dijelaskan oleh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut:

“Demi kesejahteraan para petani di Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen sebisa mungkin membantu untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, meski lahan untuk bertani terus berkurang. Tentunya dengan melakukan perhitungan-perhitungan dan kajian-kajian terlebih dahulu secara matang”. (Sugeng. Hasil wawancara. 3 April 2018).

Adapun produktivitas tanaman padi berdasarkan data yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2016

Indikator	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Padi	102.183	654.672	64,07

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen 2017

Jika dibandingkan dengan produktivitas padi Kabupaten Sragen pada tahun 2015, jumlah produktivitas tanaman padi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,55 Ku/Ha atau sekitar 0,85%. Namun, meskipun menurun, produktivitas tanaman padi Kabupaten Sragen

tetap masuk ke dalam jajaran lima besar penghasil padi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah lima daerah penghasil tanaman padi terbesar di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3. Penghasil Padi Terbesar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

No	Lokasi	Satuan	Jumlah Produksi
1	Kab. Sragen	Ton	565.256,85
2	Kab. Brebes	Ton	561.612,19
3	Kab. Grobogan	Ton	554.586,59
4	Kab. Demak	Ton	544.087,18
5	Kab. Pati	Ton	484.465,63

Sumber: BPS Jawa Tengah

Selain itu, tingkat produktivitas pertanian komoditi padi Kabupaten Sragen juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas skala provinsi Jawa Tengah maupun skala Nasional. Angka tingkat produktivitas tanaman padi antara Kabupaten Sragen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Tingkat Produktivitas Padi Skala Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016

Skala	Satuan	Jumlah Produktivitas
Nasional	Ku/Ha	52,36
Provinsi Jawa Tengah	Ku/Ha	60,39
Kabupaten Sragen	Ku/Ha	64,07

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produktivitas komoditi padi Kabupaten Sragen 3,68 Ku/Ha lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan 11,71 Ku/Ha lebih besar dibandingkan dengan produktivitas skala nasional.

“Pada 2016 kemarin tingkat produktivitas petani padi Sragen menurun dan tidak bisa mencapai target karena buah padi yang dihasilkan lebih sedikit, ya faktor cuaca penyebabnya. Meskipun begitu produktivitas petani Sragen tetap tinggi. Kita bisa membandingkan dengan skala Provinsi maupun Nasional. Selain itu capaian kinerjanya juga lebih dari 95%”. (Sugeng. Hasil wawancara. 3 April 2018).

Menurut Bapak Supriyanto, tidak tercapainya target produktivitas tanaman padi dikarenakan faktor cuaca yang pada akhirnya berimbas pada berkurangnya kuantitas padi yang dihasilkan. Kemudian jika dibandingkan dengan target produktivitas yang tertera pada RPJMD Kabupaten Sragen (2016-2021), maka pencapaian kinerja dari Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dapat dihitung dengan rumus: $(\text{Hasil} / \text{Target}) \times 100$. Target produktivitas tanaman padi tahun 2016 sebesar 64,62 Ku/Ha. Kemudian, hasil (Produktivitas) tanaman padi tahun 2016 sebesar 64,07 Ku/Ha, sehingga dapat diperoleh penghitungan angka $(64,07 : 64,62) \times 100 = 99,14\%$. Dengan demikian jumlah pencapaian kinerja Dinas Pertanian dalam peningkatan produktivitas tanaman padi tahun 2016 adalah sebesar 99,14% atau dapat dikatakan baik.

b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Petani Padi

Baiknya pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dalam produktivitas komoditas padi tentunya juga dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya petani sebagaimana menjadi pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Pembangunan kualitas sumberdaya para petani padi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dengan melakukan berbagai penyuluhan pada kelompok tani. Kelompok tani merupakan suatu kelompok yang beranggotakan para petani dan tersebar hingga tingkat desa.

Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada tahun 2016 menitikberatkan pada pembentukan penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dimana segala informasi mengenai pertanian dapat langsung tersampaikan pada kelompok-kelompok tani. Kurangnya tenaga kerja penyuluh dari internal Dinas Ketahanan Pangan adalah salah satu problem yang mendasari perekrutan penyuluh swadaya tersebut. Keluhan itu disampaikan langsung oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan pada bidang penyuluhan sebagai berikut:

“Selama tahun 2016 hingga 2017, program kita berfokus pada perekrutan penyuluh swadaya dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan kekurangan tenaga penyuluh. Perekrutan penyuluh swadaya misalnya dari tokoh-tokoh di desa yang tentunya dianggap berkompeten dalam bidang pertanian”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018).

Tidak sampai disitu saja, permasalahan mengenai kekurangan tenaga penyuluh juga merambah pada usia rata-rata penyuluh swadaya. Para penyuluh swadaya rata-rata telah memasuki usia 55 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya minat pemuda untuk terjun dalam bidang pertanian dan tentunya hal demikian menghambat peremajaan penyuluh swadaya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bidang penyuluhan:

“Rata-rata usia penyuluh swadaya itu sudah 55 tahun. Kami kesulitan mencari penyuluh swadaya yang masih muda karena mereka tidak tertarik terjun pada bidang pertanian”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018).

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen menargetkan 30 orang pertahun untuk menjadi penyuluh swadaya baru. Penyuluh swadaya baru tersebut kemudian diberi pendidikan dan pelatihan mengenai berbagai macam strategi guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sekali dalam satu tahun di tingkat Kabupaten dan sekali dalam satu tahun pada tingkat Provinsi. Pada tingkat provinsi, setiap tahunnya kabupaten Sragen mengirimkan 5 perwakilan.

“Dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan menargetkan penambahan penyuluh swadaya sebanyak 30 orang setiap tahunnya dan telah terealisasi. Kemudian mereka diberi pelatihan ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Khusus di tingkat provinsi, kami selalu mengirimkan 5 perwakilan setiap tahun”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam penambahan penyuluh swadaya dapat dihitung dengan

rumus $(\text{Hasil}/\text{Target}) \times 100$. Dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen menargetkan adanya penambahan penyuluh swadaya sebanyak 30 orang. Sedangkan jumlah penyuluh swadaya yang terekrut adalah berjumlah 30 orang. Dengan demikian maka hasil pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Sragen adalah sebagai berikut: $(30 : 30) \times 100 = 100$. Berdasarkan hasil tersebut maka pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen mengenai penambahan penyuluh swadaya adalah 100 % atau dapat dikatakan baik.

2. Responsibilitas

Kesesuaian dalam melaksanakan kegiatan dengan prinsip-prinsip administrasi merupakan hal yang vital sebagai penentu arah pembangunan. Arah pembangunan yang telah ditetapkan akan menjadi acuan yang jelas dan dapat dilihat dari adanya perencanaan strategis atau biasa disebut dengan rencana strategis. Mengenai hal ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dituntut untuk mengharmonisasikan segala strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen dengan visi dan misi dari Kabupaten Sragen.

Adapun kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip administrasi dapat dilihat dari penjabaran mengenai visi dan misi Kabupaten Sragen dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

a. Kesesuaian Program Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dengan Visi dan Misi Kabupaten Sragen

Tabel 3.5. Kesesuaian Visi dan Misi Dinas Pertanian

Kabupaten Sragen		Dinas Pertanian	
Visi	Misi	Visi	Misi
Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat	Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.	Terdepan dalam Inovasi Pembangunan dan Melestarikan Lahan Abadi Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian yang memadai 2. Mewujudkan produk buah, sayuran, dan biofarmaka yang berkualitas 3. Mewujudkan produk pertanian berkualitas yang mampu bersaing di pasar regional, nasional, dan internasional 4. Melindungi/ mempertahankan lahan pertanian produktif

Sumber: RPJMD Kab. Sragen tahun 2016-2021

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen tahun 2016 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfokus pada 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Sugeng, selaku pegawai Dinas Pertanian bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut.

“Tahun 2016 lalu, Dinas Pertanian memfokuskan untuk meningkatkan pemasaran, peningkatan penggunaan teknologi dalam bertani, kemudian yang satunya peningkatan produksi pertanian itu sendiri” (Sugeng. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dalam usaha-usaha pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen telah sesuai atau selaras dengan visi misi Kabupaten Sragen tahun 2016-2021.

- b. Kesesuaian Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dengan Visi dan Misi Kabupaten Sragen

Tabel 3.6. Kesesuaian Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sragen		Dinas Ketahanan Pangan	
Visi	Misi	Visi	Misi
Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat	Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.	Menjadi Organisasi Perangkat Daerah dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Bumi Sukowati	1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi 2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan, serta penanganan kerawanan pangan 3. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan

Sumber: RPJMD Kab. Sragen tahun 2016-2021

Berdasarkan data dari tabel diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen mempunyai beragam fungsi yang bertujuan untuk memperlancar distribusi pangan, menjaga kestabilan harga pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan keanekaragaman pangan. Hal tersebut akan dijabarkan lagi menjadi program-program sebagaimana yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2016-2021. Adapun program-program dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 7) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada bidang penyuluhan menjelaskan kepada peneliti ketika diwawancarai sebagai berikut.

“Program-program itu berguna untuk mencapai tujuan dari Kabupaten Sragen, visi misi. Bisa dicek itu programnya. Ada peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, macam-macam, ada tujuh, ya”.
(Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Kabupaten Sragen telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan telah adanya pembuatan program-program yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Sragen tahun 2016-2021.

3. Responsivitas

Kemampuan dalam membaca kebutuhan masyarakat, menyusun program prioritas dan kebijakan, serta menyerap aspirasi dari masyarakat harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan. Hal tersebut menjadi vital dikarenakan apabila kebutuhan masyarakat dengan pelayanan dari pemerintah tidak selaras dapat menghambat produktivitas, dalam hal ini adalah pada bidang pertanian. Dengan demikian maka aspek responsivitas diperlukan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen. Adapun penyerapan aspirasi yang dilakukan dalam usaha pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

Dalam penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilakukan dengan tujuan untuk menampung usulan atau kehendak masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, termasuk pada bidang pertanian.

Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tingkat Nasional, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat daerah/kabupaten.

Musrenbang pertanian dilaksanakan dari tingkat desa yang kemudian akan diwadahi pada musrenbang tingkat Kabupaten. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selalu dilibatkan dalam proses musrenbang pertanian sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat tani secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen bidang Penyuluhan ketika diwawancarai, sebagai berikut:

“Prosedur perencanaan agar sesuai keinginan masyarakat dilakukan di lapangan, dari bawah, yaitu Desa. Disana melibatkan instansi-instansi, termasuk kami. Sehingga ada tatap muka langsung dan aspirasinya akan ditampung yang kemudian akan dibahas lebih lanjut saat musrenbang kabupaten”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

b. Komunikasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Selain musrenbang, penyerapan aspirasi masyarakat dalam bidang pertanian juga dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan Kelompok Tani (Poktan). Kelompok tani merupakan himpunan para petani yang mempunyai tujuan untuk saling bertukar informasi mengenai pertanian. Para anggota kelompok tani yang kemudian tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selalu melakukan pertemuan rutin dengan pegawai dinas Ketahanan Pangan guna memberikan segala informasi-informasi terkait pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang terdapat di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Jumlah Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Sragen 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Gabungan Kelompok Tani
1	Sragen	8	5
2	Sidoharjo	12	12
3	Masaran	13	13
4	Karangmalang	10	10
5	Kedawung	10	10
6	Ngrampal	8	8
7	Sambirejo	9	9
8	Gondang	9	9
9	Sambungmacan	9	9
10	Jenar	7	7
11	Tangen	7	7
12	Gesi	7	7
13	Sukodono	9	9
14	Mondokan	9	9
15	Sumberlawang	11	11
16	Tanon	16	16
17	Plupuh	16	16
18	Gemolong	14	14
19	Kalijambe	14	14
20	Miri	10	10
Total		208	205

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Kelompok tani di Kabupaten Sragen berjumlah 205 kelompok. Adapun wilayah yang tidak mempunyai kelompok tani adalah wilayah-wilayah yang tidak mempunyai area persawahan yang bertepatan di kota Kabupaten, yaitu Sragen timur, Sragen tengah, dan Sragen barat. Terkait penanganan keluhan dari para petani dilakukan dengan 2 metode, yaitu, pertama, penyelesaian ditempat. Apabila

dalam permasalahan yang ditemui memungkinkan langsung dilakukan penanganan, maka saat itu juga pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen akan menangani masalah tersebut. Kedua, penampung aspirasi. Apabila petani mempunyai masalah dalam kegiatan bertaninya dan belum menemukan solusi ketika mediasi, serta jika para petani mempunyai suatu usulan/ide yang tidak bisa diselesaikan/dilaksanakan di tempat secara langsung, maka masalah-masalah atau gagasan-gagasan tersebut akan diproses terlebih dahulu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang Penyuluhan, sebagai berikut.

“Kita juga melakukan penyerapan aspirasi ketika bertemu dalam pertemuan rutin dengan Gapoktan yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani. Disana kita mendengar keluhan-keluhan yang kemudian akan diproses langsung apabila memungkinkan dilakukan penyelesaian secara langsung. Sedangkan jika sekiranya tidak bisa langsung diselesaikan maka akan kita proses dulu”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

c. Sarana Kritik, Saran, dan Pengaduan

Selain melalui Musrenbang dan komunikasi rutin dengan Gapoktan, penyerapan aspirasi, penyampaian kritik, saran, maupun aduan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan datang dan menyampaikan langsung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengirim surat via pos, surat elektronik (e-mail), maupun via website.

Untuk melakukan permohonan informasi atau penyampaian kritik, saran, maupun pengaduan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang Penyuluhan menuturkan bahwa terdapat prosedur yang berisi beberapa jalur dimana pemohon bebas memilih jalur yang dianggap paling mudah. Prosedur tersebut dapat dilihat di dinding beranda Dinas Ketahanan Kabupaten Sragen.

“Jadi, kalau ada yang butuh informasi apa, terkait pertanian bisa datang langsung ke sini dan bisa juga melalui jalur-jalur yang lain, ada e-mail dan lain-lain, terserah yang mudah yang mana. Prosedurnya ada didepan, bisa dilihat”. (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Adapun prosedur permohonan informasi sesuai yang tertera di beranda Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1) Mulai Meminta Informasi

Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mulai meminta informasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan memilih salah satu jalur diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang beralamat di Jalan Mayor Suharto No. 6, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- b) Melalui surat via pos yang dikirimkan ke alamat Jalan Mayor Suharto No. 6, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57212

- c) Melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan ke alamat email ppid@sragenkab.go.id
- d) Melalui website dengan mengakses <http://ppid.sragenkab.go.id>

2) Kelengkapan Permohonan Informasi

Setelah melakukan permohonan informasi pada langkah pertama, selanjutnya pada langkah kedua adalah melihat kelengkapan permohonan. Jika permohonan sudah lengkap maka akan ditanggapi oleh Dinas terkait dengan rentang waktu 10 hari ditambah 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu. Namun jika permohonan tidak lengkap maka pemohon harus melakukan klarifikasi/melengkapi permohonan terlebih dahulu.

3) Tanggapan Permintaan Informasi I (satu)

Dinas terkait akan menanggapi permohonan informasi dalam rentang waktu 10 hari ditambah 7 hari kerja perpanjangan waktu. Jika tanggapan dari Dinas terkait tidak sesuai dengan kehendak pemohon, maka pemohon dapat mengajukan keberatan ke Dinas Terkait.

4) Tanggapan Permintaan Informasi II (dua)

Apabila informasi yang diterima tidak sesuai dengan pemohon seperti yang dijelaskan pada poin diatas, maka pemohon dapat mengajukan keberatan yang kemudian akan ditanggapi ulang oleh pihak dinas terkait dalam rentang waktu 10 hari dengan 7 hari

kerja sebagai perpanjangan waktu jika diperlukan. Apabila pihak dari dinas terkait menolak atau tidak memberi tanggapan informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

5) Keberatan atas Informasi I (satu)

Atasan PPID akan memberikan informasi dalam rentang waktu 30 hari. Jika dalam rentang waktu tersebut atasan PPID tidak memberikan tanggapan, pemohon dapat mengirimkan surat keberatan atas permintaan informasi kepada atasan PPID.

6) Keberatan atas Informasi II (dua)

Apabila dalam rentang waktu 14 hari atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan atas permintaan informasi, maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada komisi informasi.

Berdasarkan prosedur diatas dapat dilihat bahwa rentang waktu tunggu pemohon informasi tergolong cukup lama, bahkan mencapai 30 hari. Namun, lama atau singkatnya waktu tunggu juga tergantung permasalahan atau informasi apa yang dimohonkan serta bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dinas terkait. Menurut pegawai Dinas Ketahanan pangan bidang Penyuluhan, problematika yang dialami petani kerap ditampung atau diselesaikan dalam pertemuan rutin antara pihak

Dinas dengan Gapoktan, dan seringkali keluhannya seputar subsidi pupuk dan harga jual padi.

“Jarang ada petani yang ke Dinas, lebih ke pertemuan rutin Gapoktan. Di sana masalah-masalah bisa langsung diselesaikan, atau ditampung dulu jika memang perlu pengkajian lebih lanjut. Biasanya seputar subsidi pupuk dan kadang-kadang harga jual padi”. (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dinilai sangat membantu para petani padi yang tergabung dalam kelompok tani. Hal tersebut dikarenakan para petani padi dapat memperoleh informasi-informasi seputar pertanian, baik pembaruan teknologi, harga jual, pupuk, dan lain sebagainya secara rutin. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Sambirejo, Suparno, saat diwawancarai sebagai berikut:

“Di sini kami merasa sangat terbantu, kita sering ada masalah hama, terus diberi solusi, kadang-kadang masalah pengairan juga, terus kami juga jadi tahu soal teknologi, pupuk, harga jual, dan lain-lain”. (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Secara keseluruhan berdasarkan informasi yang diperoleh diatas, responsivitas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat dikatakan baik. Hal itu dikarenakan para petani mempunyai sarana informasi yang berguna untuk mengatasi segala problematika seputar pertanian yang dialami oleh para petani padi, termasuk didalamnya terdapat sarana untuk kritik, saran, ataupun pengaduan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan petani padi dapat terpenuhi dan berimbas pada peningkatan produktivitas pertanian komoditas padi.

4. Kualitas Layanan

Salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kualitas pertanian adalah peran serta pemerintah dalam melakukan pelayanan yang berkualitas. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen diharuskan mampu melayani para petani di Kabupaten Sragen dengan baik sehingga para petani memperoleh kepuasan pelayanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan parameter untuk menilai kinerja organisasi publik (Agus Dwiyanto, 2012). Penggunaan indikator kualitas layanan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam hal pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melakukan pelayanan kepada petani terdapat dua macam, yaitu pelayanan fisik dan non fisik. Pelayanan fisik berupa penyediaan alat-alat pertanian sebagai sarana pendukung untuk memudahkan para petani dalam mengolah lahan dan tanamannya maupun alat-alat lain yang berguna untuk menunjang pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen. Hal ini diperlukan karena petani akan mendapatkan kemudahan dalam mengolah pertaniannya dan hal tersebut merupakan salah satu fungsi penting dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua ialah pelayanan non fisik, yaitu pelayanan berupa penyuluhan atau pendampingan yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika dari sebelum masa tanam hingga pasca panen. Dengan adanya penyuluhan

atau pendampingan tersebut para petani dapat menyampaikan keluhan-keluhan atau permasalahan apa saja yang dihadapi baik saat musim tanam, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen. Hal tersebut disampaikan saat wawancara langsung dengan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut:

“Mengenai pelayanan ya, disini ada dua pelayanan, yaitu fisik dan non fisik. Fisik itu meliputi alat-alat pertanian untuk mengolah lahan pertanian. Non fisik berupa masukan-masukan kepada petani dalam penyuluhan dari sebelum tanam hingga sesudah panen”. (Sugeng, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Adapun pelayanan fisik maupun non fisik yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen kepada para petani padi adalah sebagai berikut.

a. Pelayanan Fisik

Pelayanan fisik yang diberikan adalah pelayanan kepada petani padi dengan memberikan fasilitas guna menunjang peningkatan mutu dan produksi dalam pengolahan lahan para petani padi. Adapun sarana prasana yang dimiliki dan dapat digunakan untuk mengakomodir seluruh kepentingan petani per 31 Desember 2016 adalah berupa alat pemberantas jasad pengganggu tanaman dan alat pengolah padi yang dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Alat Pemberantas Pengganggu Tanaman Pertanian

Tahun	Jenis Alat Pemberantas Pengganggu Tanaman Pertanian			
	Hand Sprayer	Knap Sack Power	Skid Sprayer	Emposan
2013	19.859	2	-	312
2014	38.276	-	-	499
2015	38.081	-	-	-
2016	41.191	-	-	-

Sumber: LKj IP Bapelluh Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2013 jumlah *Hand Sprayer* adalah sebanyak 19.859 buah dan *Emposan* sebanyak 312 buah. Pada tahun 2014 jumlah *Hand Sprayer* sebanyak 38.276 buah dan *Emposan* sebanyak 499 buah. Pada tahun 2015 jumlah *Hand Sprayer* sebanyak 38.081 dan 2016 jumlah *Hand Sprayer* sebanyak 41.191 buah. Kemudian, jenis dan banyaknya alat pengolah padi yang tersebar pada kelompok tani di Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Alat Pengolah Padi

Tahun	Jenis Alat Pengolah Padi						
	Pedal Thresher Manual	Mobil	Cleaner/ Pembersih Padi	Penyosoh Beras	RMU	Penggilingan Kecil	Penggilingan Besar
2013	8.768	1.116	6	314	632	26	83
2014	7.104	459	0	1.280	786	366	38
2015	7.104	488	0	1.301	820	64	125
2016	7.104	488	0	1.301	820	361	66

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Tabel diatas merupakan sarana prasarana sebagai wujud dari pelayanan fisik yang dimiliki pemerintah dan dapat digunakan untuk

melayani para petani di Kabupaten Sragen. Selain itu petani juga mendapatkan pelayanan fisik berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebagai penunjang peningkatan produktivitas komoditas padi sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut:

“Kelompok tani bisa mendapat bantuan teknologi alsintan, disitu ada alat tanam, alat panen, dan sebagainya. Di bidang pertanian padi diambil perwakilan kelompok tani untuk dilatih pengenalan dan penggunaannya teknologinya di Klaten. Jadi mereka ajukan proposal dan kami akan meninjau bagaimana dilapangan, apakah benar-benar alat itu yang dibutuhkan atau mungkin ada alat yang lain” (Sugeng, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Berdasarkan pernyataan salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen tersebut diatas, para petani mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sekaligus terdapat pelatihan kepada perwakilan dari petani untuk dapat mengaplikasikan alat dan mesin pertanian dengan baik. Selain itu pihak Dinas Pertanian juga akan melakukan peninjauan di lapangan secara langsung terlebih dahulu untuk memastikan alat dan mesin pertanian apa yang dibutuhkan oleh petani sehingga bantuan alat dan mesin pertanian dapat efektif dan efisien. Adapun data mengenai bantuan alat dan mesin pertanian kepada para petani padi di Kabupaten Sragen selama tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2016

No	Jenis Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah (Unit)
1	Traktor Roda Dua	204
2	Traktor Roda Empat	8
3	Combine Harvester Kecil	84
4	Combine Harvester Sedang	20

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat selama 2016 petani padi di Kabupaten Sragen mendapatkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) antara lain; Traktor roda dua sejumlah 204 unit, traktor roda empat sejumlah 8 unit, mesin pemanen kombinasi (*Combine Harvester*) ukuran kecil sejumlah 84 unit, dan mesin pemanen kombinasi (*Combine Harvester*) ukuran sedang sejumlah 20 unit.

b. Pelayanan Non Fisik

Pelayanan non fisik merupakan pelayanan berupa pemberian fasilitas pendampingan kepada petani selama proses bertani dari sebelum masa tanam hingga masa panen. Pendampingan kepada para petani dinilai sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas maupun kualitas pertanian komoditas tanaman padi di Kabupaten Sragen. Para petani dapat menyampaikan keluhan serta masalah-masalah terkait pertanian pada saat pertemuan rutin antara pegawai penyuluhan dengan para petani, dalam hal ini komoditas padi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan bagian penyuluhan, sebagai berikut:

“Kita mengadakan pertemuan rutin dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani. Para petani bisa memberikan masukan pada kami atau menyampaikan problem-problemnya disitu, soal hama, pupuk, dan lain-lain, ya itu salah satu usaha kami untuk melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen” (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Dengan adanya pertemuan rutin tersebut para petani padi di Kabupaten Sragen merasa sangat terbantu karena tidak harus pergi ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan apabila hendak menyampaikan keluhan atau mengajukan permohonan bantuan. Selain itu para petani juga merasa puas atas pelayanan berupa penyuluhan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, akan tetapi apabila menyangkut soal bantuan berupa pengadaan alat dan mesin pertanian terkadang sedikit lambat. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Sambirejo, Suparno, saat diwawancarai. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut:

“Petani kecil seperti kami terbantu sekali dengan adanya pertemuan itu. Pelayanannya bagus. Saya dan teman-teman petani banyak dibantu. Kita juga sering mengajukan bantuan alsintan. Meskipun kalau soal bantuan kadang-kadang agak lama” (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Adapun faktor-faktor yang sering dikeluhkan para petani padi di Kabupaten Sragen dari sebelum masa tanam hingga pasca panen adalah tentang pupuk bersubsidi dan harga jual padi. Terbatasnya pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh pemerintah, khususnya di kabupaten

Sragen, membuat para petani padi harus mengeluarkan biaya lebih agar kesuburan tanah dan tanaman padi para petani tetap terjaga. Selain itu persoalan harga jual padi yang juga tidak sesuai dengan harapan seringkali membuat petani merasa kurang diuntungkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Suparno, selaku ketua kelompok tani yang bertempat tinggal di dukuh Bulakrejo, sebagai berikut:

“kalau itu biasanya teman-teman sih tentang pupuk bersubsidi, terkadang susah nyarinya, jadi kalau tidak ada stok ya terpaksa yang non subsidi, tambah biaya. Atau kalau tidak, selain itu ya soal harga jual pas panen kadang-kadang tidak sesuai harapan” (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Sedangkan menurut pegawai Dinas Ketahanan pangan bagian penyuluhan, Bapak Supriyanto, ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen sangat terbatas. Petani diharapkan tidak bergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Hal itu dikarenakan penggunaan pupuk kimia dapat menjadikan kandungan residu kimia pada tanah semakin tinggi dan berujung merusak ekosistem. Selain itu adanya isu pemerintah pusat akan melakukan impor beras tidak akan berdampak pada harga jual komoditas padi di Kabupaten Sragen. Keterangan tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan saat diwawancarai, sebagai berikut:

“Pupuk bersubsidi itu kan dibatasi. Sebenarnya merata, hanya saja terkadang perilaku petani itu inginnya tanamannya bagus, gemuk-gemuk, makanya dia hantam pupuk kimia terus. Sehingga misalnya jatah satu petani 10 kilo, dia menambah jadi 13 sampai 15 kilo, jadinya kan kurang. Tapi, alangkah lebih baik jika petani tidak bergantung terus pada pupuk kimia. Itu kan membuat residu kimia tanah jadi tinggi. Kalau soal isu

impor itu tidak ada dampak apa-apa” (Supriyanto, Hasil Wawancara, 9 April 2018)

Berdasarkan hasil keterangan diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan kepada para petani padi di Kabupaten Sragen dari pelayanan fisik maupun non fisik sudah baik. Berbagai fasilitas serta akses untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pemerintah telah dimiliki oleh para petani padi, sehingga kebutuhan serta keluhan-keluhan para petani padi dapat tersampaikan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti proses pengadaan bantuan alat dan sistem pertanian yang membutuhkan waktu sedikit lama dikarenakan membutuhkan proses dan pengkajian sesuai prosedur yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan masyarakat, yakni melakukan pelayanan kepada para petani dan melakukan pembangunan pertanian serta mempunyai tanggung jawab atas segala kebijakan, keputusan, serta tindakan kepada para petani, dalam hal ini adalah petani padi. Penelitian ini melihat akuntabilitas sebagai transparansi atau keterbukaan para pegawai dalam bekerja dan juga evaluasi atau perbaikan program yang telah terlaksana sehingga pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen akan lebih baik kedepannya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik lebih menekankan pada pertanggungjawaban kearah horizontal (*Horizontal Accountability*), yakni pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas, dan bukan hanya mematok pada pertanggungjawaban kearah vertikal (*Vertikal Accountability*), yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi. Dengan demikian akan muncul tuntutan untuk pembuatan laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. (Mardiasmo, 2002)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya tentu tak akan lepas dari permasalahan-permasalahan mengenai pertanian yang dihadapi baik di lapangan maupun di dalam internal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu sendiri. Untuk mengatasi problematika tersebut sangat diperlukan komunikasi yang baik antar pegawai, maupun pegawai dengan para petani di lapangan. Komunikasi yang baik juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan strategi pembangunan pertanian dimana para pegawai dan petani dapat bersinergi dalam menemukan ide-ide kreatif yang berguna bagi pembangunan pertanian, khususnya komoditas padi, di Kabupaten Sragen.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen mengenai komunikasi yang

dilakukan oleh para pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

“Ya kita sebagai pegawai pasti tiap hari berkomunikasi dengan pegawai lainnya. Kan setiap ada keluhan atau misalnya ada yang butuh bantuan bibit dan lainnya perlu dikomunikasikan dengan internal, tidak mungkin ‘ujug-ujug’ menetapkan sesuatu dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar selama ini”. (Sugeng, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Sugeng, salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian, komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat, khususnya petani, sudah berjalan lancar dan dapat dikatakan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, komunikasi antar pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen juga sudah berjalan dengan baik, dimana segala sesuatu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat terkhusus para petani diproses lebih dahulu dengan melakukan komunikasi dengan para pegawai maupun dengan lembaga lain yang terkait. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen bidang penyuluhan ketika diwawancarai sebagai berikut.

“Komunikasi antar pegawai lancar-lancar saja, bagus. Disini kan ada bidang-bidang, misalnya saya di penyuluhan, jadi kalau butuh sesuatu yang berkaitan dengan bidang lain tentu butuh komunikasi, ya dengan Dispertan (Dinas Pertanian) atau yang lain. Itu pasti. Apalagi yang menyangkut pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar Sragen, misalnya. Itu kan butuh komunikasi juga

dengan bupati atau pemprov (Pemerintah Provinsi)”. (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Berdasarkan pernyataan dari kedua pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, baik di dalam internal Dinas maupun dengan lembaga-lembaga lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen tentunya juga membutuhkan informasi-informasi di lapangan dari para petani padi sebagai pelaku utama pertanian. Penyerapan informasi dan ide-ide dari bawah diperlukan untuk mengetahui secara nyata apa saja yang terjadi di lapangan dimana didalamnya termasuk terdapat keluhan atau kendala serta usulan-usulan dari para petani padi guna meningkatkan produktivitas tanaman padinya. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui komunikasi antar kedua pihak, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dengan para petani padi di Kabupaten Sragen. Adapun menurut salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan mengenai komunikasi antara yang terjalin dengan para petani padi adalah sebagai berikut.

“Ya seperti tadi, ada pertemuan rutin dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Disana kita bertemu, bertukar pikiran. Yang paling penting kan ini. Kalau tidak ketemu mereka ya bagaimana kita bisa tahu apa yang mereka butuh, apa yang mereka mau”. (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen bidang penyuluhan berpendapat bahwa komunikasi dengan para petani sudah terjalin melalui pertemuan rutin antara pihak dinas dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Seperti yang dijelaskan pada poin aspek pelayanan non fisik diatas, petani padi dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait pertanian, dalam hal ini tanaman padi, dan juga mengajukan usulan atau ide-ide yang berguna bagi pembangunan pertanian komoditas padi itu sendiri. Dengan demikian, adanya komunikasi secara langsung dan rutin dengan para petani padi maka dapat dikatakan komunikasi yang terjalin dengan para petani komoditas padi sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, untuk mengukur perkembangan, dampak, serta kendala-kendala dalam pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen melakukan evaluasi atas segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen. Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran yang dapat dilakukan ketika sebelum, selama (*on going*) dan setelah kegiatan terlaksana. Meskipun begitu, seringkali evaluasi dilaksanakan hanya ketika kegiatan telah terlaksana/selesai dan bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil dari kegiatan yang terlaksana, hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari kegiatan yang terlaksana, yang berkaitan dengan kinerja (*performance*) secara teknis ataupun finansialnya (Mardikanto, 2003). Adapun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam rangka pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen menurut salah satu pegawai bidang penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

*“Tentu, tentu. Setiap tahun ada evaluasi, setelah selesai. Ada evaluasi program, ada evaluasi PAJALE (Tanaman padi, jagung, dan kedelai), ada evaluasi alsintan (Alat dan mesin pertanian)”
(Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)*

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan diatas, Bapak Supriyanto, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam usaha pembangunan pertanian komoditas padi selalu melakukan evaluasi setiap tahun meliputi evaluasi program, evaluasi tanaman pangan yang didalamnya terdapat tanaman padi, jagung, dan kedelai, serta evaluasi pada alat dan mesin pertanian. Adapun mengenai manfaat atau fungsi atas evaluasi yang telah dilakukan terhadap pembangunan pertanian komoditas padi dijelaskan lebih lanjut oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen tersebut sebagai berikut.

“Program-program yang kemarin kan bisa dilihat berhasil atau belum, keberhasilannya. Terus, kurangnya apa. Begitu juga dengan PAJALE, kalau penelitian ini khusus padi ya? Kalau padi kan juga bisa dilihat itu bagaimana petani, kualitas padi seperti apa, kendalanya apa saja selama proses, ya penanamannya, ya pas panen, atau pasca panen, terobosan apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan alsintan, kita cek kondisinya, kita tanya ke petani-petani, ini membantu atau menghambat, terus kita lihat juga kan ada data-data penanggungjawabnya, apa alatnya digunakan dengan bijak, atau malah disalahgunakan, mencari keuntungan sendiri, ya intinya itu, kita bisa menilai hal-hal kaya

gitu, terus kita rumuskan solusi-solusi kedepannya jadi lebih baik". (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Menurut salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Bapak Supriyanto, evaluasi yang meliputi program, tanaman pangan, dan alat dan mesin pertanian tersebut secara keseluruhan berguna untuk membangun pertanian yang lebih baik di masa mendatang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat mencari faktor penghambat atau kendala-kendala yang terjadi di lingkup pertanian Kabupaten Sragen, diantaranya adalah kegagalan teknologi pertanian pada petani padi, permasalahan pra tanam seperti pencarian bibit, pengolahan tanah, dan sebagainya, kemudian masalah ketika proses tanam hingga pra panen seperti pengairan, pemupukan, serangan hama, dan sebagainya, kemudian permasalahan ketika proses memanen dan pasca panen diantaranya mengenai alat dan mesin panen, hingga penjualan. Setelah diketahui problematika apa saja yang terjadi di lapangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat merumuskan atau mencari solusi-solusi dan juga terobosan-terobosan yang dinilai dapat menjadikan pertanian, dalam hal ini tanaman padi, meningkat baik dari segi hasil pertaniannya maupun sumber daya manusia petani itu sendiri.

C. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Pertanian Komoditas Padi di Kabupaten Sragen Tahun 2016

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen tahun 2016 yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen tahun 2016 antara lain:

a. Tercapainya Target Penambahan Penyuluh Swadaya Sebanyak 30 Orang

Penyuluh swadaya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan untuk membantu dalam pertukaran informasi, penyerapan aspirasi dan pembangunan kualitas sumber daya petani, khususnya petani padi. Dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021 menargetkan penambahan atau rekrutmen penyuluh swadaya sebanyak 30 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan saat diwawancarai sebagai berikut:

“Dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan menargetkan penambahan penyuluh swadaya sebanyak 30 orang setiap tahunnya dan di 2016-2017 telah terealisasi. Kemudian mereka diberi pelatihan ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Khusus di tingkat provinsi, kami selalu mengirimkan 5 perwakilan setiap tahun”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Menurut penjelasan Bapak Supriyanto diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen telah berhasil merekrut 30 orang yang bersedia menjadi penyuluh swadaya. Selanjutnya para calon penyuluh swadaya tersebut diberikan pelatihan baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

b. Terserapnya Aspirasi Petani

Gagasan-gagasan dari atas ke bawah (*top-down*) seringkali berbenturan dengan realita di lapangan. Para petani dinilai lebih jeli dalam melihat problematika yang terjadi di lapangan karena pada dasarnya mereka aktor yang secara langsung terjun dalam penggarapan lahan. Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan pertanian maka para petani dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat diwawancarai sebagai berikut:

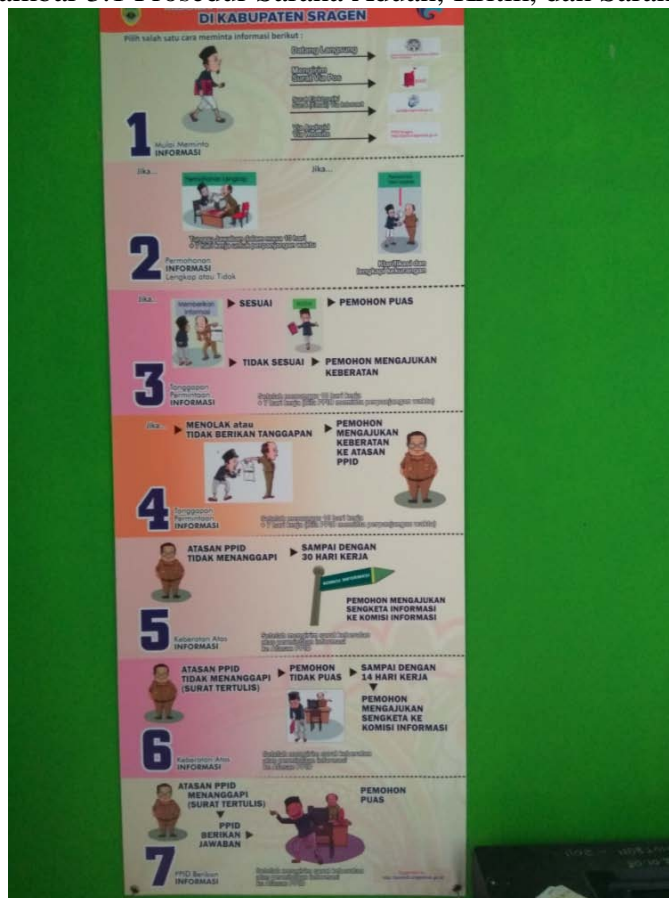
“Prosedur perencanaan agar sesuai keinginan masyarakat dilakukan di lapangan, dari bawah, yaitu Desa. Disana melibatkan instansi-instansi, termasuk kami. Sehingga ada tatap muka langsung dan aspirasinya akan ditampung yang kemudian akan dibahas lebih lanjut saat musrenbang kabupaten”.
(Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui komunikasi rutin antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan para petani yang tergabung dalam GAPOKTAN melalui penyuluhan-penyuluhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Supriyanto sebagai berikut:

“Kita juga melakukan penyerapan aspirasi ketika bertemu dalam pertemuan rutin dengan Gapoktan yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani. Disana kita mendengar keluhan-keluhan yang kemudian akan diproses langsung apabila memungkinkan dilakukan penyelesaian secara langsung. Sedangkan jika sekiranya tidak bisa langsung diselesaikan maka akan kita proses dulu”. (Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018)

Selain itu, tersedianya sarana aduan, kritik, dan saran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen juga menjadi salah satu metode yang dapat dipilih petani untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dengan prosedur yang dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.1 Prosedur Sarana Aduan, Kritik, dan Saran



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen

c. Pelayanan yang Memadai

Sebagai perwujudan pelayanan yang nyata kepada para petani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen memberikan pelayanan berupa pelayanan fisik dan non fisik. Bapak Sugeng selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen menjelaskan pelayanan yang diberikan saat diwawancarai sebagai berikut:

“Mengenai pelayanan ya, disini ada dua pelayanan, yaitu fisik dan non fisik. Fisik itu meliputi alat-alat pertanian untuk mengolah lahan pertanian. Non fisik berupa masukan-masukan kepada petani dalam penyuluhan dari sebelum tanam hingga sesudah panen”. (Sugeng, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Pelayanan tersebut berupa bantuan alat dan mesin pertanian serta penyuluhan atau pendampingan kepada para petani serta dinilai sangat diperlukan dalam upaya pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen. Adapun saat penulis mewawancarai Bapak Suparno, selaku salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Sambirejo, menanggapi positif dan memberikan sedikit kritikan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sragen sebagai berikut:

“Petani kecil seperti kami terbantu sekali dengan adanya pertemuan itu. Pelayanannya bagus. Saya dan teman-teman petani banyak dibantu. Kita juga sering mengajukan bantuan alsintan. Meskipun kalau soal bantuan kadang-kadang agak lama” (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Bapak Suparno sebagai salah satu petani sekaligus ketua kelompok tani di kecamatan Sambirejo merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan baik fisik maupun non fisik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dan memberikan kritikan

terhadap bantuan alat dan mesin pertanian yang terkadang membutuhkan waktu realisasi yang lebih lama.

d. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilakukan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui sehingga dapat dijadikan pondasi strategi kedepannya untuk tercapai pembangunan pertanian yang lebih baik. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen evaluasi program, evaluasi tanaman pangan, dan evaluasi alat dan mesin pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan saat diwawancarai sebagai berikut:

“Tentu, tentu. Setiap tahun ada evaluasi, setelah selesai. Ada evaluasi program, ada evaluasi PAJALE (Tanaman padi, jagung, dan kedelai), ada evaluasi alsintan (Alat dan mesin pertanian)” (Supriyanto, Hasil Wawancara, 3 April 2018)

Dengan demikian maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat menemukan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam jangka waktu satu tahun. Adapun temuan-temuan yang dianggap sebagai penghambat pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen akan diuraikan pada poin faktor penghambat dibawah ini.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya Luas Area Panen/Banyaknya Pengalihan Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kabupaten Sragen tentunya berimbas pada luasnya area panen yang tentunya dikhawatirkan dapat menimbulkan berkurangnya tingkat penghasilan komoditas padi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan adalah ledakan penduduk dan adanya proyek nasional berupa pembangunan jalan tol Solo-Kertosono. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Fatchur Rahman yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sragen sebagaimana yang diberitakan oleh cendananews.com, sebagai berikut:

“Sejumlah faktor yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian di Sragen terus bertambah. Seperti ledakan penduduk, alih fungsi lahan, serta adanya proyek nasional yang melintas di area persawahan yang produktif. Itu baru dampak dari jalan tol, belum lagi alih fungsi lahan serta perluasan investasi” (Cendananews.com, 15 Maret 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian. Bapak Sugeng berpendapat bahwa:

“Demi kesejahteraan para petani di Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen sebisa mungkin membantu untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, meski lahan untuk bertani terus berkurang. Tentunya dengan melakukan perhitungan-perhitungan dan kajian-kajian terlebih dahulu secara matang”. (Sugeng. Hasil wawancara. 3 April 2018).

Adapun perbandingan luas area panen dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Luas Area Panen Komoditas Padi Tahun 2014-2016

Tahun	Luas Area Panen (Ha)	Hasil Panen (Ton)
2014	100.061	585.503
2015	97.444	628.743
2016	39.928	654.709

Sumber: BPS Sragen

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa area panen pada tahun 2014 adalah seluas 100.061 Ha, pada tahun 2015 menyusut menjadi 97.444 Ha, dan kembali terjadi penyusutan pada tahun 2016 menjadi seluas 39.928 Ha.

b. Terhambatnya Peremajaan Usia Penyuluh Swadaya

Hambatan yang ditemui dalam perekrutan penyuluh swadaya adalah kurangnya minat pemuda terhadap bidang pertanian. Disisi lain rata-rata penyuluh swadaya sudah berusia 55 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian penyuluhan saat diwawancarai sebagai berikut:

“Rata-rata usia penyuluh swadaya itu sudah 55 tahun. Kami kesulitan mencari penyuluh swadaya yang masih muda karena mereka tidak tertarik terjun pada bidang pertanian”.
(Supriyanto. Hasil Wawancara. 3 April 2018).

Dengan terjadinya kasus seperti yang disebutkan diatas, tidak mustahil jika pertanian di Kabupaten Sragen kedepannya akan semakin

kekurangan generasi penerus dan berakibat linear pada berkurangnya ketersediaan bahan pangan, terutama komoditas padi.

c. Terbatasnya Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah membuat para petani, khususnya petani padi, harus mengeluarkan biaya yang lebih jika hendak membeli pupuk non subsidi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Suparno selaku petani padi sekaligus ketua kelompok tani di Kecamatan Sambirejo saat diwawancarai, sebagai berikut:

“kalau itu biasanya teman-teman sih tentang pupuk bersubsidi, terkadang susah nyarinya, jadi kalau tidak ada stok ya terpaksa yang non subsidi, tambah biaya.” (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Sedangkan menurut pegawai Dinas Ketahanan pangan bagian penyuluhan, Bapak Supriyanto, ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen sangat terbatas. Petani diharapkan tidak bergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Hal itu dikarenakan penggunaan pupuk kimia dapat menjadikan kandungan residu kimia pada tanah semakin tinggi dan berujung merusak ekosistem. Keterangan tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan saat diwawancarai, sebagai berikut:

“Pupuk bersubsidi itu kan dibatasi. Sebenarnya merata, hanya saja terkadang perilaku petani itu inginnya tanamannya bagus, gemuk-gemuk, makanya dia hantam pupuk kimia terus. Sehingga misalnya jatah satu petani 10 kilo, dia menambah jadi 13 sampai 15 kilo, jadinya kan kurang. Tapi, alangkah lebih baik jika petani tidak bergantung terus pada pupuk kimia. Itu

kan membuat residu kimia tanah jadi tinggi.” (Supriyanto, Hasil Wawancara, 9 April 2018)

d. Problematika Harga Jual Hasil Panen

Harga jual yang tidak menentu berimbas pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan petani. Penyerahan harga pada pasar dapat menimbulkan dampak negatif seperti saat hasil panen melimpah maka berakibat pada anjloknya harga jual hasil panen. Dampak dari hal tersebut dirasakan oleh petani padi yang sekaligus menjadi ketua kelompok tani Kecamatan Sambirejo, Bapak Suparno. Saat diwawancarai, Bapak Suparno mengungkapkan sebagai berikut.

“Atau kalau tidak, selain itu ya soal harga jual pas panen kadang-kadang tidak sesuai harapan” (Suparno, Hasil Wawancara, 6 April 2018)

Dengan masih ditemukannya permasalahan ketidakstabilan harga jual panen seperti yang disampaikan diatas maka kecenderungan petani padi untuk merugi juga bukan suatu kemustahilan yang kemudian hal tersebut pada akhirnya juga akan menghambat kesejahteraan pada para petani, khususnya petani padi..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan pertanian komoditas tanaman padi di tahun 2016, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek produktivitas, aspek responsibilitas, aspek responsivitas, aspek kualitas layanan, dan aspek akuntabilitas.

1. Dari segi produktivitas, capaian kinerja Dinas Pertanian dalam melakukan peningkatan produktivitas adalah sebesar 99,14% dan dapat dikatakan cukup baik. Kemudian selanjutnya, pada dinas ketahanan pangan, perekrutan penyuluh swadaya telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebanyak 30 orang atau dapat dikatakan baik.
2. Pada aspek responsibilitas, dilihat dengan adanya rencana strategis yang berfungsi sebagai landasan dan juga parameter untuk mewujudkan cita-cita yang tertera pada visi misi dari Kabupaten Sragen. Dengan adanya data dan keterangan yang tertera pada pembahasan diatas dapat dikatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen telah bekerja sesuai dengan prinsip administrasi yang telah ditetapkan.
3. Pada aspek responsivitas dan kualitas pelayanan, penyerapan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dapat dikatakan cukup efektif

terutama adanya pertemuan secara langsung antara pihak dinas dengan petani. Selain itu sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat dikatakan sudah cukup baik.

4. Pada aspek akuntabilitas. Upaya untuk mengukur keberhasilan atau melihat perkembangan atas hasil kerja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa evaluasi setiap tahun berupa evaluasi program, evaluasi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), dan evaluasi alat dan mesin pertanian telah dilaksanakan dengan rutin dan dapat dikatakan baik.
5. Pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen masih terdapat beberapa problematika kompleks yang menghambat pembangunan pertanian antara lain terus berkurangnya lahan untuk bertani, kurang minat kalangan muda untuk terjun dan terlibat pada bidang pertanian, ketersediaan pupuk subsidi, dan ketidakstabilan harga jual hasil panen.

Terlepas dari beberapa permasalahan diatas, secara keseluruhan peneliti menyimpulkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada tahun 2016 sudah baik dan diharapkan Kabupaten Sragen kedepannya tetap menjadi daerah lumbung padi nasional.

B. Saran

1. Perlu diadakan perluasan lahan pertanian dan memperketat regulasi perizinan tentang alih fungsi lahan pertanian
2. Memperluas obyek penyuluhan pertanian terlebih kepada para pemuda agar tertarik untuk terjun dalam bidang pertanian
3. Mengkampanyekan penggunaan pupuk organik agar petani tidak bergantung dengan pupuk kimia, selain bermanfaat untuk efisiensi dana, penggunaan pupuk kimia berlebihan sangat mungkin dapat merusak nutrisi tanah
4. Perbaiki dan pengoptimalan irigasi sehingga pasokan pengairan lahan pertanian tetap terjamin
5. Peningkatan alokasi dana dan perhatian yang lebih untuk pembangunan pertanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna tercapainya kedaulatan pangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dharma, Surya. 2004. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomer 3*. Juni. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo: PUSPA
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-14*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan, Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustopadidjaja, Ar. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Talidziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pfiffner, John M & Presthus, Robert V. 1960, *Public Administration*. New York: The Ronald Press Co.
- Rivai, Veitzhal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori Ke Praktik Edisi 1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung; Penerbit Bandar Maju.
- Stoner dan Wankel. *Manajemen Industri, Alih Bahasa: Sutanto*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke 17. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press.
- HAW, Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Internet

- Barilla Center For Food & Nutrition Foundation. (Juni, 2016). *Food Sustain Ability*. Diakses pada 19 Desember 2017, 14.30 WIB dari [Foodsustainability.eiu.com](http://foodsustainability.eiu.com): <http://foodsustainability.eiu.com/country-ranking/>

Cendana News. (15 Maret 2016). *200 Hektare Lahan Produktif di Sragen Rusak Akibat Proyek Nasional*. Diakses pada 4 April 2018, 20.42 WIB, dari Cendananews.com:

<http://www.cendananews.com/2016/03/200-hektare-lahan-produktif-di-sragen-rusak-akibat-proyek-nasional.html>

Kompas. (12 Agustus 2014). *Ini Hasil Sensus Pertanian 2013*.

Diakses pada 19 Desember 2017, 14:57 WIB dari Kompas.com:

<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/12/112617026/Ini.Hasil.Sensus.Pertanian.2013>

BPS Kabupaten Sragen (22 Desember 2016). *Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen 2001-2015*. Diakses pada

20 Desember 2017, 15.29 WIB dari Sragenkab.bps.go.id:

<http://sragenkab.bps.go.id/dynamictable/2016/12/22/116/luas-panen-dan-produksi-padi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sragen-2011-2015.html>